

Meneropong Peran Perempuan dalam Pekerjaan Masa Depan di Indonesia

Desintha Dwi Asriani dan Herni Ramdlaningrum



Meneropong Peran Perempuan dalam Pekerjaan Masa Depan di Indonesia

Mei 2020

Daftar Isi

Pengantar	VI
Pendahuluan	VIII
Gender dan Kerja di Indonesia	1
Peran perempuan di tempat kerja	1
Perubahan tren pekerjaan dan dampak Revolusi Industri 4.0 bagi perempuan	3
Kerja perawatan bagi perempuan dan dampak dari keuntungan demografi	4
Dampak perubahan iklim dan isu lingkungan hidup pada partisipasi tenaga kerja perempuan	4
Pekerjaan Masa Depan bagi Perempuan dan Narasi Digitalisasi	6
Perspektif feminis	6
Sektor utama dalam pekerjaan masa depan bagi perempuan	6
Prioritas Kajian Selanjutnya	9
Perempuan dan kerja perawatan	9
Masa depan perlindungan sosial	9
Kerangka kerja gender bagi kebijakan terkait pekerjaan masa depan	9
Catatan Akhir	10
Daftar Pustaka	12

Pengantar

Meski pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan terjadi di Asia, namun jurang kesenjangan terus melebar dengan sejumlah besar kelompok masyarakat tetap termarginalisasi secara ekonomi dan sosial.

Perempuan di Asia terus mengalami hambatan struktural yang masif, sejak di bangku sekolah hingga masa pensiun – jika mereka ingin dan diijinkan untuk bekerja – dan hingga mereka mencapai usia lanjut. Adalah perempuan yang umumnya tereksplorasi sebagai buruh murah di industri ekspor dan sektor-sektor berketerampilan rendah di Asia, terutama pertanian, industri tekstil dan sepatu, dan elektronik. Mereka dibayar dengan upah yang sekedar cukup sebagai penyambung hidup dan mengalami kerentanan yang semakin meningkat dalam bekerja dan hidup.

Di tengah berbagai kesenjangan ini, kini hadir transformasi teknologi yang cukup pesat hingga mengubah sifat pekerjaan hari ini dan masa depan yang menawarkan begitu banyak peluang; namun di sisi lain juga menambah tingkat risiko baru bagi banyak kelompok sosial di seluruh dunia, khususnya di kelompok negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah atau yang dikenal sebagai ‘Selatan’ (*Global South*) dalam melebarkan kesenjangan yang sudah ada.

Gig-economy dan ekonomi berbasis platform serta kerja kerumunan (*crowdworking*) cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kerja layak. Perempuan khususnya rentan dan secara tidak proporsional terdampak oleh perubahan ini, baik dalam konteks Revolusi Industri 4.0 maupun dalam kerja perawatan yang terus berekspansi di seluruh sektor formal dan informal.

Sayangnya, produktivitas yang diramalkan dapat dicapai melalui otomatisasi dan digitalisasi di banyak sektor kemungkinan besar tidak akan memberikan harapan tinggi bagi perempuan untuk perbaikan mendasar atas potensi mereka yang berada di bawah *status quo*. Akibat

minimnya akses terhadap pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pengetahuan profesional, perempuan di Asia berisiko untuk tergelincir lebih dalam ke situasi tanpa pekerjaan atau memilih bermigrasi jauh dari rumah demi pekerjaan.

Tujuan bagi perempuan di Asia dan bagi kita dalam upaya kerjasama pembangunan adalah mencari solusi yang adil secara sosial dan setara-gender dalam menjawab tantangan ini, diantaranya dengan mendukung sistem yang efisien, adil, dan terjangkau untuk membekali keterampilan, meningkatkan keterampilan, dan mengasah ulang keterampilan para pekerja, dengan mengidentifikasi jalur transisi kerja, mendefinisikan kebijakan yang menjamin keadilan gender di dunia kerja masa kini dan masa depan, serta menegosiasikan ulang distribusi dan remunerasi dari kerja perawatan. Solidaritas dan koalisi dengan berbagai gerakan progresif di Asia dan di luar Asia menjadi sangat penting dalam proses ini.

Melalui jejaring regional kami, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menghimpun beragam suara dari gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk bekerja sama dalam mengembangkan ide-ide dan narasi progresif untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial. Diantara kerangka yang paling inovatif adalah inisiatif FES Asia yang baru bertajuk “Perspektif Perempuan dalam Pekerjaan Masa Depan”. Dengan dukungan wawasan mendalam dari para peneliti di sembilan negara Asia, FES dan para mitranya bermaksud untuk mendorong lebih kuat lagi kesetaraan gender di dunia kerja dengan penekanan pada penguatan partisipasi publik dan kehidupan politik perempuan, serta mendukung kerja layak untuk semua seiring dengan keadilan gender dan model ekonomi yang berpusat pada manusia.

Hasil studi yang tersaji ini adalah suatu titik awal untuk analisis dan diskusi lebih lanjut mengenai situasi perempuan terkait tren dan persepsi terhadap pekerjaan masa depan di Indonesia dan bagaimana mencapai keadilan gender. Kami menyampaikan terima kasih

kepada rekan kerjasama kami Desintha Dewi Asriani dan Herni Ramdlaningrum untuk penulisan studi ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami pada Dewi Candraningrum dan Christa Wichterich atas komentar konstruktifnya terhadap versi awal studi ini.

Mirco Günther dan Lea Gölnitz

FES Office for Regional Cooperation in Asia

Kami harap publikasi ini berkontribusi pada diskusi yang bermanfaat dan memberi wawasan bernilai bagi inisiatif di masa depan.

Sergio Grassi dan Rina Julvianty

FES Indonesia Office

Pendahuluan

Kerentanan ekonomi Indonesia ditantang oleh ambang Revolusi Industri 4.0 yang akan mengubah struktur kerja, produktivitas dan khususnya dinamika kesetaraan gender. Pekerjaan dan tugas tertentu sudah menghilang. Meski demikian, beberapa kesempatan kerja baru bermunculan dan negara-negara yang berhasil meningkatkan dan melatih ulang keterampilan tenaga kerjanya akan sangat diuntungkan dari transformasi ini.

Di tengah surplus demografi, pemerintah telah merespon momentum Revolusi Industri 4.0 dengan menargetkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh ekonomi besar dunia pada 2030. Target ini akan tercapai melalui beberapa kebijakan, diantaranya Peta Jalan Making Indonesia 4.0 dan Peta Jalan Kebijakan Pembangunan Vokasional 2017-2025 yang masing-masing diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Making Indonesia 4.0 bertujuan untuk membangkitkan kembali industri manufaktur di lima sektor, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik dan kimia.¹ Sedangkan Peta Jalan Kebijakan Pembangunan Vokasional 2017-2025 berusaha untuk memenuhi kebutuhan industri dan bisnis akan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan tinggi dan fokus pada enam sektor, yaitu agribisnis, pariwisata, ekonomi digital, manufaktur, layanan kesehatan dan pekerja migran.²

Revolusi Industri 4.0 juga telah mendapat perhatian dari para aktor non-pemerintah seperti serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Kedua pihak telah bekerja

sama dalam Koalisi Kerja Layak yang mempromosikan dialog multi pemangku kepentingan dan kerjasama dalam mengatasi disrupsi kerja yang diakibatkan oleh transformasi digital. Koalisi ini menelisik bagaimana ketidaksetaraan bisa ditangani melalui peningkatan keterampilan kerja untuk memperkuat akses terhadap kerja layak, termasuk bagi perempuan – sesuatu yang selama ini absen dalam diskusi kebijakan pemerintah.

Kedua kebijakan tersebut mengklaim memiliki pendekatan yang holistik dalam menciptakan dan mengambil peluang di era digitalisasi. Namun, proses diskusi dan ketentuan kebijakan tidak pernah diteropong melalui lensa gender. Pemerintah tampaknya kurang memahami pentingnya kerangka kerja gender untuk menembus tantangan masa depan, sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara dari digitalisasi.

Studi ini mengeksplorasi masa depan kerja perempuan berdasarkan sektor-sektor dimana perempuan telah berpartisipasi secara tradisional dan menawarkan sebuah proyeksi berdasarkan beberapa faktor penentu seperti keuntungan demografi, perubahan iklim, serta disrupsi lingkungan dan teknologi. Namun, dikarenakan kurangnya kajian yang memadai dan data terbaru, ada beberapa keterbatasan dalam analisis tentang bagaimana digitalisasi telah berdampak pada perempuan dalam angkatan kerja. Lebih banyak ditemukan laporan media yang menyoroti bagaimana perempuan memanfaatkan digitalisasi melalui platform ekonomi digital seperti *e-commerce*.

Gender dan Kerja di Indonesia

Peran perempuan di tempat kerja

Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah momentum yang dapat membantu mendekonstruksi hambatan berlapis yang dihadapi perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan hak, khususnya akses kerja, karena sejumlah jenis pekerjaan akan bertambah sebagai akibat dari ekspansi di beberapa sektor. Namun hingga kini norma dan sosial-budaya tetap menjadi faktor penghalang yang mengontrol partisipasi kerja perempuan. Hal ini ditambah dengan sejumlah kebijakan dan lembaga yang membatasi perempuan untuk mencapai kesetaraan hak. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia terbaru (Sakernas, 2018)³ menunjukkan bahwa rasio laki-laki dan perempuan dalam populasi usia kerja hampir sama jumlahnya, yaitu 97.2 juta laki-laki berbanding dengan 97.6 juta perempuan. Meskipun demikian, masih ada disparitas besar antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kerja.

Grafik 1 mengilustrasikan bahwa hampir separuh dari perempuan berusia produktif hilang dari sektor kerja, sementara lebih dari 80 persen laki-laki turut berpartisipasi dalam kerja.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak hanya lebih rendah daripada laki-laki, namun juga terkonsentrasi di beberapa sektor. Perempuan terutama ditemukan di sektor manufaktur, jasa dan pertanian. Ini memunculkan pertanyaan tentang dimana separuh dari perempuan usia kerja lainnya jika mereka tidak masuk dalam angkatan kerja. Faktanya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak pernah terpisah dari perannya sebagai pekerja perawatan dalam keluarga dan komunitas.

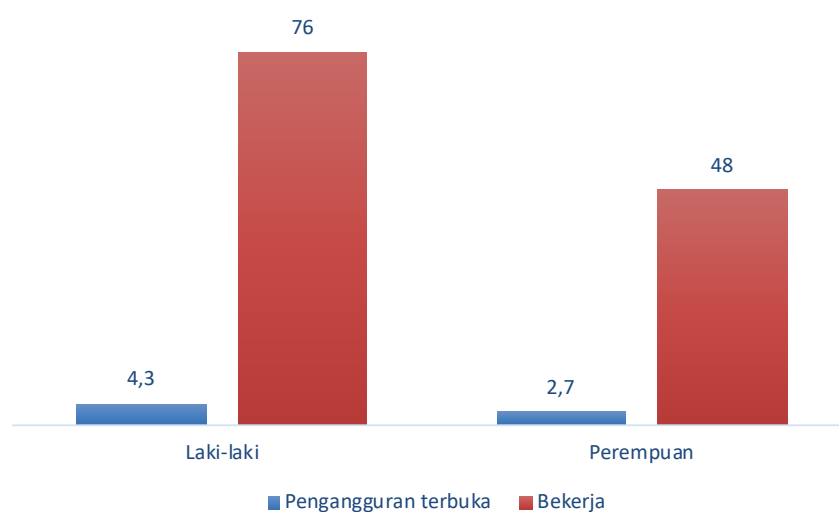
Grafik 2 menegaskan dominasi perempuan dalam aktivitas dan layanan rumah tangga berbayar.

Grafik 3 menunjukkan bahwa 35 juta perempuan tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja akibat beban tanggung jawab domestik. Dapat dikatakan bahwa begitu perempuan menikah, mereka menghilang dari pasar kerja berbayar.

Argumen untuk mengubah kerja perawatan tak berbayar menjadi kerja profesional dan layak merupakan respon dan persiapan untuk transisi demografi pada 2050, ketika Indonesia akan memasuki era populasi menua dengan 80 juta orang lanjut usia. Menciptakan kerja perawatan

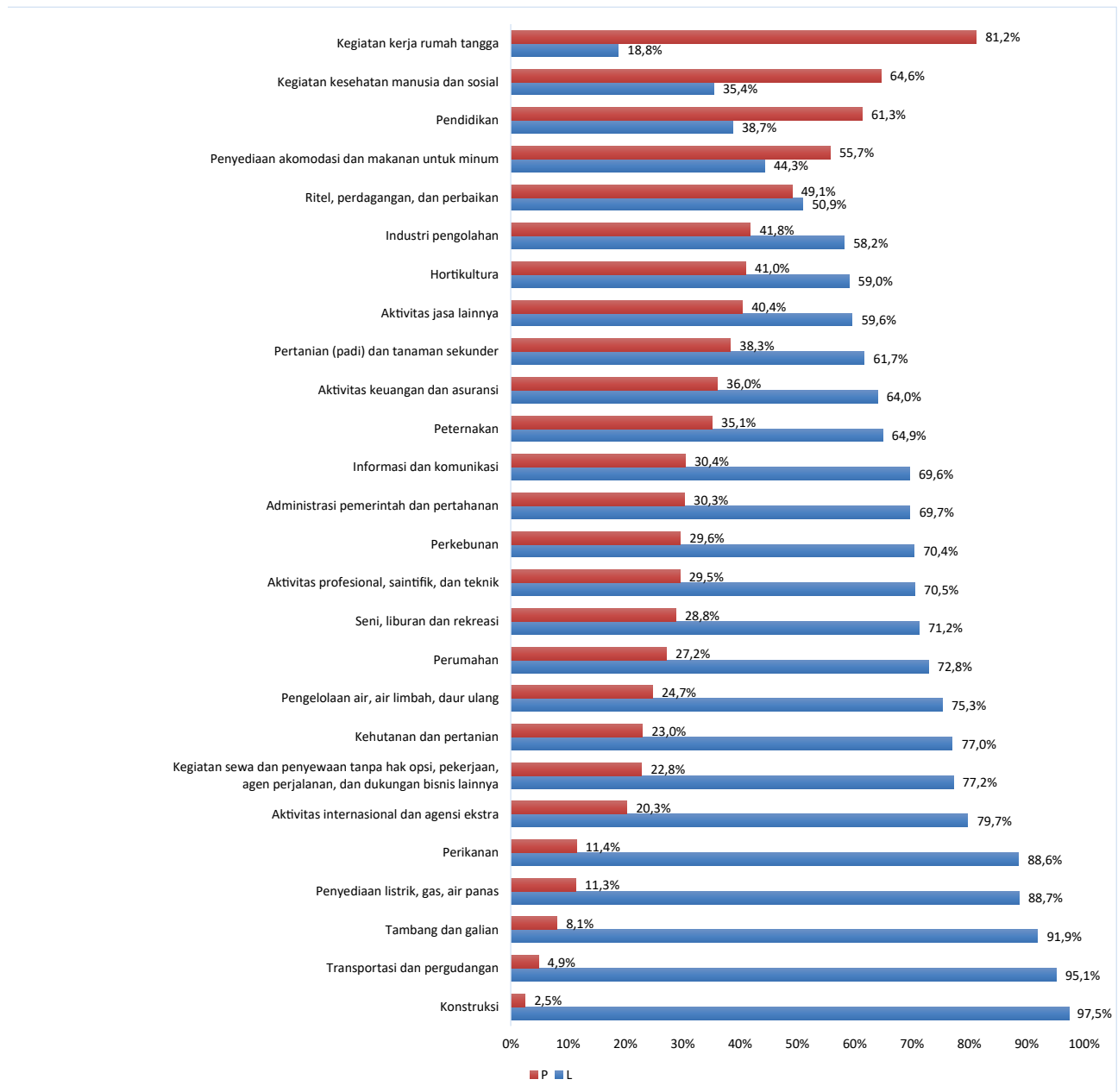
Grafik 1. Angkatan kerja (dalam %)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (Jakarta: BPS RI, 2018)

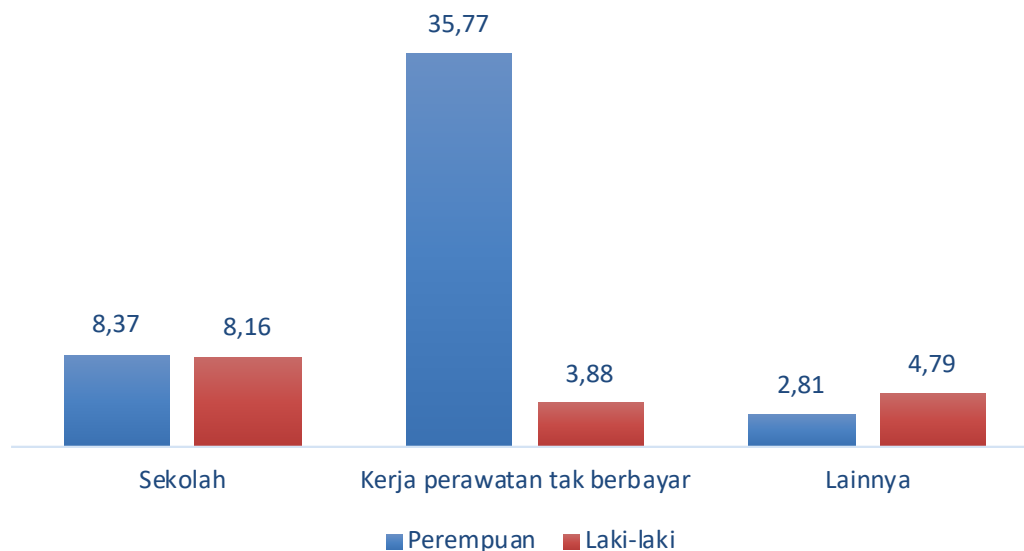


Grafik 2. Data Terpilah Pasar kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (Jakarta: BPS RI, 2018).



Grafik 3. Bukan Angkatan Kerja (dalam juta)

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Survei Angkatan Kerja Nasional 2018* (Jakarta: BPS RI, 2018)

profesional dan berstandar tinggi dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja dan juga menciptakan bentuk-bentuk kerja berbayar lainnya. Ini berarti kerja perawatan profesional dan berbayar dengan ‘sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui’ dapat mengurangi beban perempuan dalam kerja perawatan tak berbayar dan menyediakan sistem pendukung bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja. Ini diperkuat oleh temuan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berargumen bahwa jenis pekerjaan yang cenderung lebih banyak berkembang ada di sektor yang secara tradisional didominasi oleh perempuan, seperti usaha kecil dan menengah, kesehatan, pendidikan dan layanan sosial.⁴

Perubahan tren pekerjaan dan dampak Revolusi Industri 4.0 bagi perempuan

Berdasarkan data tren ketenagakerjaan Indonesia pada 2017 dan 2018 terjadi peningkatan persentase angkatan kerja di beberapa sektor, terutama pada penyediaan akomodasi dan minuman (0.68 persen), jasa lainnya (0.40 persen) dan industri pengolahan (0.39 persen), sementara

itu populasi angkatan kerja di sektor lain menurun, seperti di sektor pertanian (1.41 persen), konstruksi (0.20 persen) dan jasa pendidikan (0.16 persen) (Badan Pusat Statistik, 2018).

Secara umum, perempuan dan laki-laki memiliki harapan dan kecemasan terhadap perbedaan yang dibawa oleh teknologi digital baru. Sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur adalah yang paling lazim menggunakan otomatisasi; namun diperkirakan penggunaannya akan terus menyebar meski dalam level yang berbeda-beda, di semua sektor dan di banyak jenis pekerjaan, termasuk jenis-jenis pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh perempuan seperti ritel, perdagangan, serta jasa makanan dan minuman.

Digitalisasi telah berdampak pada situasi ekonomi di Indonesia, termasuk transformasi dari UKM tradisional ke platform *e-commerce*. Namun, keterbatasan data yang tersedia mengindikasikan bahwa perempuan di UKM tidak mendapatkan manfaatnya. Berdasarkan data transaksi *e-commerce* pada periode 2016 - 2017, penggunaan platform digital oleh perempuan usaha kecil relatif rendah; bahkan berkurang di periode waktu tersebut dari 42,7 persen ke 34,4 persen.⁵

Persentase tersebut mencerminkan kesenjangan yang lebar dalam partisipasi perempuan di ekonomi digital, dengan pertimbangan bahwa diantara 57 juta UKM di Indonesia, 60 persen diantaranya dimiliki atau dipimpin oleh perempuan.⁶ Sebuah survei yang dilakukan oleh Facebook, OECD dan Bank Dunia menemukan bahwa perempuan lebih banyak mengelola UKM ketimbang laki-laki. Namun, para pengusaha laki-laki lebih banyak menggunakan platform daring ketimbang perempuan.

Contoh lain adalah fenomena belanja daring yang telah meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menguntungkan sebagai pekerjaan alternatif bagi perempuan karena tidak terikat oleh jam kerja yang ketat dan ruang kantor. Tetapi tingkat pertumbuhan belanja daring yang tinggi cenderung menargetkan perempuan sebagai konsumen potensial, meski data menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan internet berdasarkan gender, yaitu 48,6 persen perempuan berbanding dengan 51,4 persen laki-laki.⁷

Kerja perawatan bagi perempuan dan dampak dari keuntungan demografi

Konsep dividen gender (*gender dividend*) baru-baru ini dimunculkan dalam diskusi yang lebih luas tentang dividen demografi (*demographic dividend*). Dividen gender dapat mengalir dari tingkat kesuburan yang rendah, yang mengurangi beban perempuan untuk merawat tanggungan dan memberi waktu luang untuk aktivitas produktif lainnya, terutama pekerjaan formal. Pekerjaan perawatan seperti merawat anak dan orang lanjut usia, menyediakan makanan, mencuci pakaian dan membersihkan rumah, telah dikonstruksikan secara sosial dan budaya sebagai tugas yang dilakukan oleh perempuan dalam keluarga. Jenis kerja semacam ini adalah kerja perawatan tak berbayar. Oleh karenanya, perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang tidak mendatangkan penghasilan. Tambahan lagi, kerja perawatan sering membatasi peran sosial dan peran produktif perempuan, meskipun Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)⁸ menyatakan bahwa kerja perawatan adalah jantung kemanusiaan dan karenanya berkontribusi pada ekonomi.

Dampak perubahan iklim dan isu lingkungan hidup pada partisipasi tenaga kerja perempuan

Perempuan di Selatan sedang mengalami bentuk-bentuk baru diskriminasi gender akibat dari degradasi lingkungan.⁹ Ekspansi industri telah menciptakan isu-isu kompleks yang berdampak pada perempuan, seperti menghadapi ancaman kerawanan pangan dan isu hak atas tanah yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perempuan pedesaan tak lagi memiliki ruang untuk menggunakan kearifan dalam merawat alam akibat ekspansi kegiatan industri yang telah membuat mereka kehilangan akses terhadap alam sebagai sumber kesejahteraan. Di Indonesia berbagai aksi protes oleh perempuan adat di Bengkulu, Manggarai, Molo, Papua dan Rembang, mulai dari aksi massa hingga gerakan tanpa busana, telah menandai bagaimana peran perempuan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat masih kurang dihargai. Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang dalam pembangunan industri ekstraktif tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga berdampak negatif pada mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari perempuan mengingat aktivitas perempuan sangat melekat pada lingkungan alam.

Degradasi lingkungan dapat merusak komponen penting untuk kesehatan secara umum dan kesehatan ibu secara khusus (misalnya ketersediaan air bersih, udara segar dan makanan bergizi), termasuk kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi serta hak-hak perempuan.

Ketika industri kelapa sawit mulai beroperasi pada tahun 1960, misalnya, pembukaan hutan melalui ijin penebangan hutan menjamur. Pada waktu itu pemerintah memberikan akses tanah pada industri untuk pembukaan lahan dan konsesi.¹⁰ Hanya dalam 20 tahun (1990-2010) perkebunan kelapa sawit berekspansi dari sekitar 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar dan kemudian menjadi 11,9 juta hektar pada 2017.¹¹ Dampak dari industri kelapa sawit pada perempuan lebih buruk ketimbang pada laki-laki, dikarenakan ancamannya terhadap peran perempuan dan mata pencaharian keluarga. Ketika perempuan bekerja di perkebunan kelapa sawit, mereka kerap diabaikan dan mengalami perlakuan diskriminatif, padahal keterlibatan mereka sangat mempengaruhi proses produksi. Wright¹² berargumen bahwa 86 persen

pekerja perkebunan kelapa sawit adalah laki-laki, ini karena perusahaan memandang kerja fisik tidak cocok untuk perempuan.

Lebih jauh, partisipasi perempuan dalam industri kelapa sawit tidak pernah diakui sebagai kerja upahan, sehingga mereka tidak mendapat hak yang sama seperti pekerja laki-laki. Kebanyakan perempuan yang terlibat dalam industri ini tetap “tak terlihat” dan tidak diakui karena kerja mereka adalah untuk “membantu” suami mereka mencapai target kerja yang sangat tinggi yang ditentukan oleh perusahaan.¹³ Ini bisa memicu efek domino, dimana para perempuan muda dalam keluarga harus berhadapan dengan ancaman masa depan, semisal pernikahan dini. Data nasional selama tiga tahun terakhir (2016–2018)¹⁴ mencerminkan 1,6 juta pernikahan anak yang tercatat. Persentase tertinggi dari pernikahan anak terjadi di Kalimantan, provinsi dimana satu juta hektar tanah telah dieksploitasi dan ditandai untuk perkebunan kelapa sawit.

Pekerjaan Masa Depan bagi Perempuan dan Narasi Digitalisasi

Perspektif feminis

Dalam struktur patriarkal, perempuan Indonesia sering dianggap sebagai manajer rumah tangga, berlawanan dengan tugas “moral” laki-laki sebagai suami dan pencari nafkah utama. Segregasi gender semacam ini, yang juga diolah ulang dalam kapitalisme dan konservatisme¹⁵ menciptakan proses “*housewifization*”¹⁶ [proses dimana pembagian kerja dan konstruksi patriarki memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga semata] dan berkontribusi dalam mendevaluasi kerja rumah tangga sehari-hari yang dikategorikan sebagai kerja perawatan tak berbayar.

Terkait pekerjaan masa depan, perlakuan terhadap kerja perawatan bisa berbeda jika pelaksanaannya oleh keluarga dan komunitas telah diperluas, sehingga menghasilkan tak hanya idealisasi peran ibu melainkan juga normalisasi pembagian kerja. Menurut Walby,¹⁷ pengakuan atas kerja perawatan sebagai aktivitas produktif akan membantu mengurangi kesenjangan yang diakibatkan oleh kesempatan kerja yang tidak setara. Dia juga mencatat adanya faktor-faktor rasional mengenai mengapa dan bagaimana rasio jenis kelamin yang setara dalam angkatan kerja adalah solusi potensial bagi masalah kesenjangan produktivitas: pertama, modal manusia (*human capital*) dari perempuan akan meningkat secara relatif dalam pendidikan dan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Kedua, akan ada fleksibilitas untuk menggabungkan tanggung jawab “kerja” dan “perawatan” yang akan membantu mengurangi interupsi dalam pekerjaan akibat adanya kewajiban mengurus keluarga dan anak. Ketiga, pasar yang lebih berimbang berpotensi untuk mengurangi perlakuan diskriminatif dan meningkatkan keamanan bagi tenaga kerja perempuan. Tantangannya adalah norma sosial mulai dari budaya, adat dan agama yang telah lama mengonstruksikan pemaknaan atas kerja perawatan sebagai manifestasi kesukarelaan, cinta, pengorbanan dan pengabdian.

Akibat konstruksi sosial, teknologi masih dianggap sebagai bidang non-feminin, sehingga partisipasi perempuan juga rendah dalam jenis pekerjaan tersebut

atau pada manfaatnya dalam memberi efek di dunia kerja, khususnya inovasi dan kemajuan teknologi.¹⁸ Di sisi lain, ketika digitalisasi dan otomatisasi mengalami kemajuan, ada kebutuhan mendesak untuk membekali perempuan dengan pengetahuan sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM). Namun, ketika partisipasi perempuan meningkat, mereka cenderung menjadi kelompok konsumen alih-alih pelaku dalam ekonomi platform.¹⁹ Digitalisasi di Indonesia masih dianggap sebagai transformasi dari metode bisnis konvensional.²⁰ Transformasi ini menghasilkan suatu lingkungan yang menghambat partisipasi aktif dalam inovasi dan justru menjadikan perempuan sebagai konsumen baru. Namun komposisi pemegang modal ekonomi dari teknologi baru ini tetap sama, dengan perempuan tertinggal di belakang. Akar dari kurangnya kesadaran dan penggunaan platform digital tak terpisah dari stereotip gender dan ketidaksetaraan yang menghalangi perempuan dalam mengakses kesempatan untuk meraih dan mengambil manfaat dari karir di bidang STEM.²¹

Dengan anggapan bahwa teknologi merupakan produk pengetahuan laki-laki, pekerjaan masa depan tidak seharusnya hanya menciptakan ruang untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam teknologi produksi. Partisipasi perempuan harus dipandang sebagai input yang bernilai, sehingga perkembangan teknologi harus terhubung dengan proses untuk mengekspos bagaimana perempuan memahami dan mengambil manfaat dari sains dan teknologi.²²

Sektor utama dalam pekerjaan masa depan bagi perempuan

Keterlibatan perempuan di e-commerce

Digitalisasi telah berdampak pada situasi ekonomi di Indonesia, termasuk transformasi dari UKM tradisional ke platform *e-commerce*. Namun, keterbatasan data yang tersedia mengindikasikan bahwa perempuan di UKM tidak mendapatkan manfaatnya. Berdasarkan data transaksi *e-commerce* pada periode 2016 - 2017,

penggunaan platform digital oleh perempuan usaha kecil relatif rendah; bahkan berkurang di periode waktu tersebut dari 42,7 persen ke 34,4 persen.²³ Persentase tersebut mencerminkan kesenjangan yang lebar dalam partisipasi perempuan di ekonomi digital, dengan pertimbangan bahwa diantara 57 juta UKM di Indonesia, 60 persen diantaranya dimiliki atau dipimpin oleh perempuan.²⁴ Sebuah survei yang dilakukan oleh Facebook, OECD dan Bank Dunia menemukan bahwa perempuan lebih banyak mengelola UKM ketimbang laki-laki. Namun, para pengusaha laki-laki lebih banyak menggunakan platform daring ketimbang perempuan.

Namun tingkat partisipasi perempuan dalam platform ekonomi tidaklah tinggi dibandingkan laki-laki.²⁵ Akar dari kurangnya kesadaran dan penggunaan platform digital tak terpisahkan dari stereotip gender dan ketidaksetaraan yang menghalangi perempuan dalam mengakses kesempatan untuk meraih dan mengambil manfaat dari karir di bidang STEM.²⁶ Tantangan berbasis gender lainnya ditemukan dalam fenomena belanja daring yang telah meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan belanja daring yang tinggi cenderung menargetkan perempuan sebagai konsumen potensial, meski data menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan internet berdasarkan gender, yaitu 48,57 persen perempuan berbanding dengan 51,43 persen laki-laki.²⁷

Memajukan peran perempuan di sektor manufaktur

Manufaktur adalah sektor ketiga dengan partisipasi perempuan tertinggi di Indonesia setelah pertanian, ritel, perdagangan dan jasa perbaikan (seperti perbaikan elektronik dan mekanik otomotif). Perempuan sangat mungkin berpartisipasi dalam sektor manufaktur karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi maupun keterampilan tingkat lanjut. Menurut Menteri Perindustrian, pada 2018 sektor manufaktur mempekerjakan hingga 18,3 juta orang.²⁸ Industri ini telah lama mengalami feminisasi dan pekerja perempuan telah lama menghadapi kesenjangan upah, lingkungan kerja tidak aman dan kurangnya perlindungan berbasis gender. Kini dengan kemunculan Revolusi Industri 4.0 bertambah pula kekhawatiran lain: pemutusan hubungan

kerja bagi 37,5 juta pekerja yang bisa digantikan oleh teknologi.²⁹

Ada persepsi umum bahwa beberapa jenis pekerjaan mulai menghilang, seperti dalam belanja ritel, agen perjalanan dan perbankan.³⁰ Serikat pekerja telah menunjukkan keprihatinannya soal bagaimana revolusi teknologi telah memicu hilangnya pekerjaan di sektor manufaktur. Jika teknologi mutakhir mengarah pada otomatisasi dan robotisasi, pekerjaan perempuan di sektor manufaktur kemungkinan akan tergantikan. Akibat ketidakmampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan terkait STEM karena alasan-alasan sosial budaya, mereka mungkin tidak akan mampu untuk bersaing di era teknologi. Untuk memastikan keberlanjutan partisipasi perempuan dalam sektor prioritas manufaktur seperti makanan dan minuman, tekstil dan garmen, perempuan harus dibekali dengan keterampilan tingkat lanjut yang memadai untuk pekerjaan masa depan.

Kerja perempuan adalah kunci bagi produktivitas pertanian

Di daerah pedesaan Indonesia, perempuan adalah tulang punggung ekonomi. Ada 13 juta perempuan petani diantara 38 juta petani kecil yang bekerja di sektor pertanian dan kehutanan.³¹ Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (2018) memperkirakan ada 61 persen perempuan desa yang terlibat aktif dalam produksi ternak dan kehutanan dan mempraktikkan aktivitas pertanian yang lebih ramah lingkungan. Mereka juga berkontribusi pada ekonomi keluarga.

Namun feminisasi kemiskinan pada perempuan kepala keluarga dalam rumah tangga di wilayah pedesaan cenderung tinggi.³² Jumlah perempuan kepala keluarga dalam rumah tangga di Indonesia lebih dari 10 juta, mengisi 10 persen dari seluruh populasi perempuan.³³

Peningkatan kemajuan teknologi telah menyentuh wilayah pedesaan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menantang produktivitas petani, karena sistem transfer teknologi dari pola pertanian tradisional ke modern belum diterima secara luas oleh para petani yang masih menggunakan peralatan tradisional ketimbang teknologi canggih.

Selain terbatasnya sumber daya, pengetahuan yang terbatas juga menghalangi adopsi teknologi di sektor pertanian. Masalahnya menjadi lebih serius bagi perempuan yang mengalami kesenjangan tiga kali lipat (*triple divide*): digital, pedesaan, dan gender.³⁴ Perempuan petani mengalami kesulitan mengakses informasi, teknologi pertanian baru, produk dan jasa finansial serta perluasan pasar melalui platform digitalisasi.³⁵

Oleh karena itu, pengarusutamaan dan perluasan pelatihan literasi digital bagi perempuan menjadi krusial untuk mencegah melebarnya ketimpangan digital (*digital divide*) dan memastikan bahwa teknologi pertanian akan diadopsi oleh, dan bermanfaat untuk perempuan petani.

Pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi bagi perempuan

Pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja harus disediakan untuk menutup kesenjangan antara permintaan pasar kerja dan ketersediaan angkatan kerja. Hal ini bisa dilakukan melalui program Pendidikan Pelatihan Teknik dan Vokasi Teknis (TVET) untuk meningkatkan kemampuan kerja dan partisipasi dalam pembelajaran jangka panjang. Namun, *International Centre for Technical and Vocational Education and Training*³⁶ berargumen bahwa sistem TVET di Indonesia membutuhkan peningkatan khususnya di dua aspek utama: memperkuat keterkaitan antara pelatihan praktis dan keterampilan yang diajarkan di lembaga-lembaga TVET serta permintaan pasar kerja; dan meningkatkan rasio guru dengan latar belakang akademik dan pelatihan praktis, karena tingkat pendidikan tenaga kerja di dominasi oleh para pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah dari sekolah tingkat menengah. Kualitas sumber daya manusia bisa diakselerasi melalui TVET.

Peluang karir bagi perempuan mungkin terlihat seperti pilihan bebas, tapi tantangan sosial yang signifikan menghambat anak-anak perempuan dan perempuan muda untuk memasuki bidang STEM dalam studi mereka atau dalam mencari berbagai opsi pekerjaan yang terkait.³⁷ Candraningrum and Dhewy³⁸ berargumen bahwa anak-anak perempuan dan perempuan muda bisa menguasai subyek-subyek STEM di sekolah tapi merasa

takut, cemas, dan malu ketika berhadapan dengan guru mereka. Ini mengindikasikan masih ada bias kuat dalam proses pembelajaran STEM di sekolah. Penulis juga merujuk ke satu laporan UNESCO yang mengutip bahwa kurang dari 19 persen kontrak kerja dalam bidang STEM dipegang oleh perempuan. Konsekuensinya, perempuan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan sains dan teknologi. Ini kemudian berdampak pada pola kebijakan infrastruktur dan politik ekonomi yang luas serta menguatkan kesenjangan berbasis gender. Di Indonesia, dua dari tiap sepuluh perempuan telah memilih untuk bekerja secara profesional di industri STEM, dan tiga dari tiap sepuluh perempuan telah menjadi peneliti di bidang STEM.³⁹ Badan Pusat Statistik juga menemukan bahwa hanya sekitar 30 persen perempuan pekerja memiliki karir di industri STEM.⁴⁰

Kerja perawatan dan keragaman tempat kerja bagi perempuan

Badan Pusat Statistik memperkirakan ada sekitar 24 juta orang lanjut usia (lebih tua dari 60 tahun) di Indonesia.⁴¹ Dengan surplus demografi angka ini diprediksi akan mencapai 80 juta orang di 2050, dan menjadikan Indonesia salah satu dari populasi menua terbesar di dunia. Transformasi demografi dari populasi ini membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyediakan dukungan bagi orang lanjut usia. Hal ini akan memberi peluang bagi perempuan, jika pemerintah dan masyarakat mengubah apresiasi mereka yang rendah terhadap kerja perawatan tak berbayar dan menerimanya sebagai kerja profesional dan berbayar.

Kurangnya dukungan pemerintah, seperti terhadap perawatan anak dan orang lanjut usia, telah menyebabkan stagnasi partisipasi perempuan dalam kerja perawatan. Oleh karena itu, para pekerja perawatan tak berbayar membutuhkan dukungan memadai dari pemerintah karena kebanyakan perempuan di kerja perawatan tak berbayar tidak mandiri secara finansial. Seperangkat kebijakan untuk mendukung dan memberi nilai pada kerja perawatan tak berbayar adalah suatu keharusan.

Prioritas Kajian Selanjutnya

Perempuan dan kerja perawatan

Kajian lebih lanjut tentang kerja perawatan dengan perspektif feminis akan membantu untuk memetakan bagaimana aktivitas perempuan telah berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Hal ini juga bermanfaat untuk menentukan pengalaman perempuan dalam kerja perawatan seperti apa yang dapat dirumuskan sebagai masukan untuk mengurangi feminisasi kemiskinan. Secara lebih praktis, apa yang dilakukan perempuan dalam kerja perawatan, khususnya dalam rutinitas rumah tangga adalah suatu jasa (dan kebutuhan) mendasar di masyarakat. Ketiadaan pengakuan dari kerja semacam itu dalam bentuk kebijakan tak hanya menjebak perempuan, tapi juga mendorong orang untuk semakin meninggalkan kerja perawatan, karena mereka memilih terjun ke aktivitas ekonomi yang mendatangkan penghasilan.

Situasi ini berisiko menimbulkan bencana. Sebagai contoh, tren demografi saat ini mengarah pada proporsi besar orang lanjut usia di masa depan; namun selama tidak ada rencana antisipatif untuk merawat jumlah orang lanjut usia yang terus bertambah, kesenjangan sosial dapat muncul yang akan mempengaruhi stabilitas produktivitas secara umum. Untuk menuai manfaat yang optimal dari dividen demografi, dengan mempertimbangkan perempuan Indonesia yang masih kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar, investasi yang lebih besar ke modal manusia para perempuan muda menjadi keharusan dan bisa mengarah pada masa depan perempuan dalam kerja layak dengan upah yang lebih tinggi.

Perlindungan sosial di masa depan

Untuk menguatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan masa depan, perlindungan sosial harus dijajaki lebih jauh lagi. Partisipasi perempuan di tempat kerja, termasuk di sektor pertanian, sering tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memastikan mereka memiliki akses ke sumber-sumber kesejahteraan dan jaminan sosial. Isu ini penting untuk diatasi. Meski demikian, pengalaman perempuan dalam kerja subsisten menunjukkan suatu pendekatan alternatif untuk melindungi mereka dari eksploitasi melalui sistem pendukung yang memadai.

Kajian mengenai perlindungan sosial di masa depan akan bermanfaat untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk mengakui kerja perawatan tak berbayar sebagai modal yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi nasional, sekaligus mengakui kontribusi ekonomi perempuan. Telaah lebih lanjut atas perlindungan sosial yang juga dikontekstualisasikan di dalam kerangka kerja gender menjadi krusial.

Kerangka kerja gender bagi kebijakan terkait pekerjaan masa depan

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peta jalan tentang bagaimana Indonesia dapat mengubah ancaman Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang. Namun kurangnya kerangka kerja gender dalam berbagai kebijakan ini takkan menguatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Untuk mengoptimalkan kebijakan, penting mempelajari lebih lanjut bagaimana kerangka kerja gender dapat memberikan masukan dan hasil yang berbeda dalam rangka mendorong perempuan berpartisipasi lebih baik dalam pekerjaan di masa depan.

Catatan Akhir

1. Kementerian Perindustrian, *Making Indonesia 4.0* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018).
2. Coordinating Ministry for Economic Affairs, *Implication of Changing Forms of Employment and New Business Models on Industrial Relations in Indonesia* (Jakarta: Kemenko, 2018).
3. Badan Pusat Statistik, *Survei Angkatan Kerja Nasional 2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018).
4. Organisation for Economic Co-operation and Development, *Policy Brief on Women's Entrepreneurship* (Paris: OECD, 2017), diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2UWliCO>.
5. Putri Syifa Nurfadilah, "Pemanfaatan E-Commerce di Kalangan Perempuan Masih Rendah," Kompas, diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2GPvXba>.
6. "Infografik: 60 Persen UMKM di Indonesia Dikelola oleh Perempuan," *Kumparan*, diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2UEze0p>.
7. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019), diakses pada 15 Februari 2019. <http://bit.ly/2UFcOHD>.
8. International Labour Organization, *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work* (Bangkok: ILO, 2018), diakses pada 15 Februari 2019. <http://bit.ly/2UYTNdd>.
9. Vandana Shiva and Maria Mies, *Ecofeminism* (Halifax, Canada: Fernwood, 1993).
10. Nur Muhammad Bachtiar, Catriningrum Dianita dan Nirmala Fau Teodora, "Sejarah Hadirnya Sawit di Indonesia," *Validnews*, diakses pada 15 Maret 2017. <http://bit.ly/2Vsx6NF>.
11. *ibid.*
12. Alison Wright, *Socio-Economic Impacts of Palm Oil and Biodiesel: The Case of Indonesia* (Berlin: Springer, 2014), 151-170.
13. *Indonesia: Exploitation of women and violation of their rights in oil palm plantations*, World Rainforest Movement, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2XUsayV>.
14. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018).
15. Sonja Van Wichelen, ed., *Reconstructing Muslimness: New Bodies in Urban Indonesia*, Aldershot, England: Ashgate Publishing Limited, 2007), 104-119.
16. Maria Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour* (London: Zed Book, 1998); Julia Suryakusuma, *State of Ibuism* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).
17. Silvia Walby, "Gender (In) Equality and The Future of Work," *Working Paper Series*, No. 55 (Equal Opportunities Commission 2007), 4-52, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2WbG8f5>.
18. Judy Wajcman, "From Women and Technology to Gendered Technoscience," *Journal of Information, Communication & Society* 10, No. 3. (2007), 287-298, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2UTYUqd>.
19. Organisation for Economic Co-operation and Development, "Going Digital the Future of Work for Women," *Policy Brief on The Future of Work* (2017), diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2UJmZzN>.
20. "Interview with Markus Schlüter: Digitalisation in Indonesia," Rödl & Partner, 23 Mei 2018. <http://bit.ly/2YBjBcs>.
21. Allison Master and Andrew N. Metzoff, "Building Bridge Between Psychological Science and Education: Cultural Stereotypes, STEM and Equity," *Prospect-UNESCO* (Paris), 215-234, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2iVN2S9>.
22. Perdana Putri, "Pencarian Teknologi Feminis: Tantangan Feminis Abad XXI," *Jurnal Perempuan* 91, No. 4 (2016), 59-75, diakses pada 15 Maret 2019. <http://bit.ly/2GGhrkp>.
23. Putri Syifa Nurfadilah, "Pemanfaatan E-Commerce di Kalangan Perempuan Masih Rendah," Kompas, diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2GPvXba>.
24. "Infografik: 60 Persen UMKM di Indonesia Dikelola oleh Perempuan," *Kumparan*, diakses pada 3 Maret, 2019. <http://bit.ly/2UEze0p>.
25. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019), diakses pada 15 Februari 2019. <http://bit.ly/2UFcOHD>.
26. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019), diakses pada 15 Februari 2019. <http://bit.ly/2UFcOHD>.

27. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019), diakses pada 15 Februari 2019. <http://bit.ly/2UFc0HD>.
28. Rany fauziah, "Menperin: Industri Manufaktur Serap 18,25 Juta Tenaga Kerja pada 2018," 15 Februari 2019, <http://bit.ly/2VNI1nd>
29. Yanita Patriella, "Di Tengah Revolusi Industri 4.0, Buruh Minta Perlindungan," 30 April 2019, <http://bit.ly/30vQGsg>.
30. Aulia Adam, "Pekerjaan yang Hilang karena Digitalisasi Perbankan," 26 September 2017, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2HxJl4>; "Menaker Sebut 3 Profesi yang Rentan Hilang Karena Digitalisasi," *Kumparan*, 13 Desember 2017, diakses pada Maret 2019. <http://bit.ly/2VLU0kn>.
31. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018).
32. Ruslan Kadir, "Refleksi Hari Ibu: Perempuan dan Kemiskinan." Last modified December 21, 2017. <http://bit.ly/2UQhdwg>.
33. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018).
34. Sophie Treinen, Alice Van der Elstraeten and C. Fredrick, "Mainstreaming Gender in the Use of Information and Communication Technologies for Agriculture and Rural Development," *Gender and ICTs* (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018), 1-87.
35. Chipo Msengezi and Williams Yentl, "Overcoming the Divide on Women and Digitalisation in Agriculture," Wageningen, CTA Agriculture 2019).
36. UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training, "World TVET Database Indonesia" (Paris), 2013, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2GBTVVJ>.
37. Allison Master and Andrew N. Metzoff, "Building Bridge Between Psychological Science and Education: Cultural Stereotypes, STEM and Equity", *Prospect-UNESCO* 46 (2017), 215-234, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2IVN2S9>.
- 38.3 Dewi Candraningrum and Anita Dhewy, "Fear, Bullying & Will of Female Students in STEM: Case Study of Vocational Schools in Jakarta", *Jurnal Perempuan* 21 (2016), 431–441, diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2GGhrkp>.
39. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018); "Status Perempuan Dalam Stem" [Sains, Teknologi, Engineering & Matematika], *Yayasan Jurnal Perempuan* 91 (2016), diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2DMN7nV>.
40. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018); "Status Perempuan Dalam Stem" [Sains, Teknologi, Engineering & Matematika], *Yayasan Jurnal Perempuan* 91 (2016), diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2DMN7nV>.
41. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016–2018* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018)

Daftar Pustaka

- Adam, Aulia. "Pekerjaan yang Hilang karena Digitalisasi Perbankan." 26 September 2017. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2HxJji4>
- Candraningrum, Dewi and Anita Dhewy. "Fear, Bullying & Will of Female Students in STEM: Case Study of Vocational Schools in Jakarta", *Jurnal Perempuan* 21, No. 4 (2016): 431-441. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2GGhrkp>.
- Badan Pusat Statistik. Survei Angkatan Kerja Nasional 2018. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018.
- Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2016.
- Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2017
- Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018.
- Fauziah, Rany. "Menperin: Industri Manufaktur Serap 18,25 Juta Tenaga Kerja pada 2018." Jakarta, 12 Februari 2019. Diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2VNI1nd>.
- International Labour Organization. *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work*. Geneva: ILO, 2018. Diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2UYTNdd>.
- "Indonesia: Exploitation of Women and Violation of Their Rights in Oil Palm Plantations." *World Rainforest Movement*, March 7, 2018. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2XUsayV>.
- "Infografik: 60 Persen UMKM di Indonesia Dikelola oleh Perempuan." *Kumparan*, date. Diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2UEze0p>.
- Kadir, Ruslan. "Refleksi Hari Ibu: Perempuan dan Kemiskinan." Last modified 21 Desember 21, 2017. <http://bit.ly/2UQhdwq>.
- Master, Allison and Andrew N. Metzoff. "Building Bridge Between Psychological Science and Education: Cultural Stereotypes, STEM and Equity." *Prospect-UNESCO* 46 (2017): 215-234. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2IVN2S9>.
- "Menaker Sebut 3 Profesi yang Rentan Hilang Karena Digitalisasi." *Kumparan*, 13 Desember 2017. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2VLU0kn>.
- Msengezi, Chipso and Yentl Williams. *Overcoming the Divide on Women and Digitalisation in Agriculture*. Wageningen: CTA Agriculture, 2019.
- Mies, Maria. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London: Zed Book, 1998.
- Moss-Racusin, A. Corrine et al. "Science Faculty's Subtle Gender Biases Favor Males Students". *Proceeding of the National Academy of Sciences of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109, no. 41 (2012). Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2J73a38>.
- Muhammad Bachtiar Nur, Dianita Catriningrum dan Teodora Nirmala Fau. "Sejarah Hadirnya Sawit di Indonesia," *Validnews*, 14 Maret 2017. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2Vsx6NF>.
- Patriella, Yanita. "Di Tengah Revolusi Industri 4.0, Buruh Minta Perlindungan." *Bisnis.com*, 30 April 2019. <http://bit.ly/30vQGsg>.
- Putri, Syifa Nurfadilah. "Pemanfaatan E-Commerce di Kalangan Perempuan Masih Rendah," *Kompas*, 22 Juli 2018. Diakses pada 3 Maret 2019. <http://bit.ly/2GPvXba>.
- Putri, Perdana. "Pencarian Teknologi Feminis: Tantangan Feminis Abad XXI." *Jurnal Perempuan* 91. No. 4 (2016): 59-75. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2GGhrkp>.
- Rödl & Partner. "Interview with Markus Schlüter: Digitalisation in Indonesia." 23 Mei 2018. <http://bit.ly/2YBjBcs>.
- Shiva, Vandana and Maria Mies. *Ecofeminism*. Halifax, Canada: Fernwood, 1993.
- Suryakusuma, Julia. *State of Ibuism*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

- Organisation for Economic Co-operation and Development, "Going Digital: The Future of Work for Women" (2017). Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2UJmZzN>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. "Policy Brief on Women's Entrepreneurship." Paris: OECD, 2017. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2UWliCO>.
- Tong, R. Putnam. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra, 1998.
- Treinen, Sophie, Alice Van der Elstraeten and C. Pedrick. *Gender and ICTs: Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies (ICTs) for agriculture and rural development.* Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018: 1-87.
- UNESCO-UNEVOC "International Centre for Technical and Vocational Education and Training." *World TVET Database Indonesia* (2013). Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2GBTVVJ>.
- "Universal Basic Income Ala Koperasi," *Kompas*, 19 Maret 2019. Diakses pada 19 Maret 2019. <http://bit.ly/2VyhlVB>.
- Wajcman, Judy. "From Women and Technology to Gendered Technoscience." *Journal of Information, Communication & Society* 10, No. 3. (2007): 287-298. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2UTYUqd>.
- Walby, Silvia. "Gender (In) Equality and The Future of Work". *Working Paper Series*, No. 55. City: Equal Opportunities Commission, 2007: 4-52. Diakses pada 14 Maret 2019. <http://bit.ly/2WbG8f5>
- Wichelen Van, Sonja, ed. *Reconstructing 'Muslimness': New bodies in urban Indonesia*. Aldershot, England: Ashgate Publishing Ltd, 2007: 104-119.
- Wright, Alison. *Socio-Economic Impacts of Palm Oil and Biodiesel: The Case of Indonesia*. Berlin: Springer, 2014.
- Yayasan, Jurnal Perempuan. "Status Perempuan Dalam Stem." *Yayasan Jurnal Perempuan* 91 (2016).

Tentang Penulis

Desintha Dwi Asriani adalah kandidat PhD (pada saat penulisan country study ini, kini telah meraih gelar PhD) dari Department of Women's Studies, Ewha Womans University di Seoul, Korea Selatan. Ia juga mengajar di Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selain itu ia terlibat aktif dalam kajian mengenai isu-isu gender dan seksualitas, politik tubuh, keagenan perempuan dan HAM.

Herni Ramdlaningrum saat ini adalah Program Manager pada Perkumpulan Prakarsa dengan keahliannya pada bidang kebijakan sosial dan penguatan komunitas. Ia telah lebih dari sepuluh tahun berpengalaman dalam manajemen program, merancang proyek strategis, dan memastikan dampak proyek yang berkelanjutan. Selain itu berpengalaman pula dalam mengorganisir jejaring dan multi-pemangku kepentingan baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk memobilisasi sumber daya dan pengetahuan dalam pengembangan dan implementasi program.

Pandangan dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendapat dari Friedrich-Ebert-Stiftung.

Diselaraskan dengan publikasi versi Bahasa Inggris berjudul "Examining Women's Role in the Future of Work in Indonesia."

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah yayasan politik tertua di Jerman. Adapun namanya diambil dari nama presiden Jerman pertama yang terpilih secara demokratis, Friedrich Ebert.

Pada 1968 FES mendirikan Kantor Perwakilan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Selama beberapa tahun terakhir FES melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung reformasi sistem jaminan sosial, terciptanya negara kesejahteraan dan pembangunan sosial ekonomi serta transformasi sosial di tingkat kota. Di tingkat kawasan dan internasional, FES mempromosikan praktik-praktik dialog di Indonesia kepada negara-negara lain sebagai rujukan bagi perkembangan demokratisasi, sosial ekonomi dan pembangunan yang damai.

Publikasi ini merupakan bagian dari seri 'country study' bertema Perempuan dan Pekerjaan Masa Depan, sebuah proyek regional di bawah koordinasi 'FES Office for Regional Cooperation in Asia' yang berkedudukan di Singapura.

Imprint

© 2020 Friedrich-Ebert-Stiftung
Indonesia Office
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730, Indonesia

Penanggung Jawab:

Sergio Grassi | Country Director
Rina Julvianty | Program Coordinator

Telepon: +62-21-7193711

www.fes-indonesia.org

 Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office

Untuk mendapatkan publikasi ini,
silakan menghubungi:
info@fes.or.id

Materi publikasi yang diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan tertulis dari FES.